

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Olahraga adalah serangkaian gerak yang teratur dan terencana untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan. Pengertian ini memiliki makna filosofis dan jika dikaji bersama akan memberikan sedikit bayangan tentang hal-hal apa yang akan dilakukan untuk pembangunan dan mendepankan olahraga itu sendiri. Meningkatkan tingkat partisipasi dalam olahraga menjadi isu kebijakan penting diseluruh dunia terutama Negara-Negara Eropa, karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan oleh setiap manusia. Olahraga dikenal sebagai kegiatan fisik yang dikenal sebagai kegiatan terbuka bagi semua orang yang sesuai dengan kemampuan, kesenangan dan kesempatan, tanpa membedakan hak, status sosial, budaya, atau derajat di masyarakat.

Pembangunan olahraga Indonesia tidak bisa di pandangan lagi hanya sebagai aktifitas penunjang kesehatan, tetapi seharusnya olahraga sudah menjadi Gaya hidup aktif bagi setiap warga Negara Indonesia, yang setiap tahun peningkatan akan menjadi target sasaran yang terukur (Hylton, 2013, WHO, 2002 UN, 2005; Ma'mun, 2013). Karena olahraga mampu menyentuh berbagai dimensi di dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan wahana peningkatan kualitas mutu kehidupan (Van Der Woude et al., 2013). Olahraga merupakan hak dan kebutuhan dasar setiap manusia, hal itu sebagai upaya meraih kehidupan yang lebih baik, sehingga olahraga juga merupakan kebutuhan sehari-hari dan harus menjadi budaya. Hal itu juga telah di nyatakan dalam artikel (*The International Charter of physical Education and Sport*) yang telah diadopsi oleh UNESCO 1978 dengan gerakan Sport for All-nya.

Olahraga memiliki atribut unik yang memungkinkannya berkontribusi pada proses pengembangan. Kapasitas sebagai alat komunikasi, perannya dalam mengurangi resiko penyakit menular dan menjadi fondasi untuk menetapkan fondasi bagi pengembangan anak yang sehat bersama dengan kemampuan untuk menghubungkan orang-orang memahami

menjadi alat yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan pembangunan (*development through sport*) dan olahraga dapat merangsang dan mengembangkan seluruh potensi diri setiap orang yang melakukannya, baik jasmani (Hastie et al., 2017), pengetahuan dan pemahaman termasuk berfikir kritis, kreatif dan problem solving (Pill & SueSee, 2017) sikap, mental dan aspek-aspek Sosio-psikologis (Dionigi et al., 2018), maupun aspek-aspek sosio-psikologikal seperti *Life skill*, *Social Capital*, dan nilai-nilai kehidupan (Kidd, 2011). Sehingga perlu melestarikan gagasan “*Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat*” perlu diwujudkan dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat tentang arti dan fungsi nilai keolahragaan, sehingga meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan keolahragaan Nasional. Olahraga juga sebagai kendaraan untuk pengembangan sosial dan pribadi (Ha et al., 2015) dan yang populer di mana untuk mempromosikan pengembangan pemuda positif (PYD) (Hellison & Wright, 2003; R. M. Lerner et al., 2009), karena olahraga memiliki daya tarik yang jauh tidak terhingga, sehingga jutaan orang muda yang terlibat dalam kegiatan olahraga secara teratur berdampak pada perkembangan masyarakat, diperlukan interaksi yang kompleks antara faktor-faktor kontekstual dan sosial (Dionigi et al., 2018)

Olahraga seumur hidup adalah tujuan penting dari kebijakan olahraga dan kesehatan, karena efek positifnya pada kesehatan, kebugaran dan integrasi social, partisipasi dalam aktivitas fisik atau olahraga dapat mendukung pembelajaran yang digerakkan remaja (Camiré et al., 2009; R. Lerner, 2005; Weiss et al., 2016), independen dari yang disengaja, dewasa, pengajaran kecakapan hidup. Pada dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi. Ini tentang inklusi dan kewarganegaraan. Olahraga menyatukan individu dan komunitas, menyoroti kesamaan dan menjembatani perbedaan budaya atau etnis. Olahraga menyediakan forum untuk mempelajari keterampilan seperti disiplin, kepercayaan diri, dan kepemimpinan serta mengajarkan prinsip-prinsip inti seperti toleransi, kerjasama, dan rasa hormat. Olahraga mengajarkan nilai upaya dan cara mengelola kemenangan serta kekalahan. Ketika aspek-aspek positif dari olahraga ini ditekankan, olahraga menjadi kendaraan yang kuat di mana PBB dapat bekerja untuk mencapai tujuan untuk 'pengembangan melalui olahraga' atau 'olahraga untuk pengembangan', yang terutama berfokus pada peran yang dapat dimainkan oleh olahraga

dalam berkontribusi pada pengembangan sosial dan perubahan sosial. Ini dituangkan dalam penjelasan dan justifikasi PBB untuk 'pengembangan melalui pendekatan olahraga':

Pada dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi. Ini tentang inklusi dan kewarganegaraan. Olahraga menyatukan individu dan komunitas, menyoroti kesamaan dan menjembatani perbedaan budaya atau etnis. Olahraga menyediakan forum untuk mempelajari keterampilan seperti disiplin, kepercayaan diri, dan kepemimpinan serta mengajarkan prinsip-prinsip inti seperti toleransi, kerjasama, dan rasa hormat. Olahraga mengajarkan nilai upaya dan cara mengelola kemenangan serta kekalahan. Ketika aspek-aspek positif dari olahraga ini ditekankan, olahraga menjadi kendaraan yang kuat di mana PBB dapat bekerja untuk mencapai tujuannya.

Pada bulan November 2003 the general assembly of the United Nations telah mengadopsi resolusi 58/5 yang berjudul: “***Sport As A Means to Propmote Education, Health, Development and Peace***”. Hal ini menunjukkan setiap Negara yang menjadi anggota PBB seharusnya mengadopsi resolusi tersebut untuk ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Posisi olahraga menjadi sesuatu yang begitu sentral karena PBB pada tahun 2003 telah mengembangkan isu *Sport For Development And Peace* (SDP), sehingga sekarang menjadi isu strategis untuk di sebarluaskan ke seluruh dunia. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) dan Komite Olimpiade Internasional (IOC) pertama kali sudah menggunakan olahraga untuk mencapai tujuan terkait pembangunan di awal tahun 1920, walaupun Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) baru mulai dilembagakan tahun 2000-2015 dan sekarang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030, selanjutnya SDGs ini menjadi dasar yang menghadirkan SDP memberikan peran penting bagi olahraga dalam pembangunan Bangsa-Bangsa maju di dunia, terbukti ketika menggunakan olahraga terstruktur secara efektif, sistematis dan koheren dapat memberikan kontribusi penting bagi kesehatan masyarakat, perkembangan sosial yang berdampak positif (Commission et al., 2013), pendidikan universal, kesetaraan gender, mengurangi kemiskinan, pencegahan HIV dan AIDS dan penyakit lainnya, kelestarian lingkungan pembangunan perdamaian dan resolusi

konflik (Beutler, 2008; Kidd, 2011), dan olahraga dapat menawarkan pendidikan untuk anak-anak yang terasingkan dari sekolah peluang umum; misalnya melindungi anak-anak yang beresiko di dalam ruang-ruang yang diawasi dengan aman, menyediakan anak-anak yang memiliki sedikit atau tidak ada modal peran keluarga dengan kekuatan sosialisasi yang positif, mengajar tanpa kekerasan, keragaman budaya dan toleransi antar pribadi, menawarkan pilihan waktu luang yang sehat, mengurangi penarikan experiment anak (U Phüse & M Gerber, 2005)

Pada 23 Agustus 2013, pada sesi ke-67 Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi A / RES / 67/296 melalui konsensus yang menyatakan 6 April sebagai Hari Olahraga Internasional untuk Pembangunan dan Perdamaian. Ini adalah langkah bersejarah dalam mengakui peran kuat yang dapat dimainkan olahraga dalam mengejar perkembangan sosial yang positif. Pembentukan Hari ini mengikuti salah satu rekomendasi akhir dari Forum Internasional ke-3 tentang Olahraga untuk Perdamaian dan Pembangunan yang berlangsung pada Juni 2013, dan bertujuan untuk mengakui upaya internasional dan kemajuan yang dibuat dalam SDP.

Kebijakan olahraga dan manajemen serta sosiolog telah mengadvokasi proyek SDP sebagai kendaraan yang aktif, melibatkan dan memperdayakan untuk kesejahteraan individu dan masyarakat (Schulenkorf et al., 2014). Misalnya, program olahraga telah dilakukan untuk menciptakan modal sosial dan perubahan sosial di dalam dan di antara masyarakat (Kay, 2009; Skinner et al., 2008), untuk berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan (Kobayashi et al., 2013), untuk secara positif mengubah peran gender dan meningkatkan partisipasi wanita dalam berolahraga (Hayhurst, 2011; Meier & Saavedra, 2009) dan untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi gaya hidup sehat di masyarakat yang kurang beruntung (Njelesani, 2011).

Pada acara scientific Congress Asian Games ke 13 di Bangkok 1996, Astrand seorang sport scientist dari Departement of physiology and pharmacology Karolinska Institute Sweden pernah mengatakan bahwa salah satu syarat utama untuk membangun prestasi olahraga adalah bentuknya masyarakat yang bugar. Olahraga bukan hanya di tujukan untuk segelintir orang yang mencari prestasi tetapi olahraga sudah menjadi kebutuhan yang bernilai universal, yang harus difasilitasi oleh pihak pemerintah terhadap untuk masyarakat Negara. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 11 dapat dijadikan kerangka dasar bagaimana hak dan kewajiban pemerintah,

yaitu: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban memberikan dukungan dana, ruang terbuka dan ketenagaan keolahragaan guna menyelaraskan pembangunan olahraga. Ketika kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi otonomi daerah, maka banyak pihak yang memberi harapan kepada pemerintah daerah untuk lebih maju dari tahun ke tahun untuk mengembangkan potensi olahraga tiap-tiap daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada kepentingan politik dan publik yang cukup besar dalam peran olahraga dan mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi dan rekonstruksi dalam masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini harus berada dalam konteks yang lebih luas dari sektor memperluas olahraga untuk memajukan bentuk-bentuk personal, sosial, dan pembangunan masyarakat. Kebijakan sosial olahraga di garis bawah oleh tujuan kesejahteraan proyek SDP termasuk, misalnya perdamaian dan penyelesaian konflik dalam masyarakat yang terpecah; menangkal rasisme, intoleransi dan prasangka, mempromosikan pendidikan kesehatan, kesetaraan gender dan integrasi masyarakat yang terpinggir dan menangani kejahatan dan pengucilan sosial di daerah-daerah tertentu (Armstrong, 2004, 2007; Gasser & Levinsen, 2004; Hayhurst, 2009; Höglund & Sundberg, 2008; Lea-howarth, 2006; Willis, 2000).

Konseptualisasi pemerintahan dan sifat penerapannya pada olahraga telah bervariasi secara signifikan meskipun studi cenderung memusatkan pada definisi yang berkaitan dengan Tujuan, manajemen, dan kekuasaan (Pielke, 2019). Integritas olahraga masih merupakan konsep yang muncul dalam dunia etika olahraga, ekonomi, tata kelola dan manajemen (Harvey & McNamee, 2019). Selain itu, penting untuk memahami tuas, hambatan, atau kesulitan yang terkait dengan proses pelibatan pemegang kebijakan dengan berbagai status dan bidang tindakan (Viollet et al., 2020). Dalam mengurai kelemahan kebijakan olahraga di Indonesia dapat melihat gambar di bawah ini:

Tabel 1.1:

Kelemahan Kebijakan Pengembangan Olahraga di Indonesia (Ma'mun, 2019)

Sports Scope				
Era	Educational	Recreational	Elite	Description
Old Order (1945– 1966) ± 21 years	Not considered a strategic issue because it was not populist in the political realm.	Only invited to perceive elite sports activities as a movement	The coaching and development system had not been developed, with the exception of preparations for the 1962 Asian Games	Focus on sports coaching in the political area
New Order (1966– 1998) ± 32 years	Not considered a strategic issue despite following the public tendency	Becomes an important issue with the goal of fitness only	There is no standard concept except for multi-event preparation.	There Description Focus on sports coaching in the political area There is a focus on sports coaching in the community, but it is still unstructured.
Reform Era (1998– present)	Considered an important issue, although new as policy materia	Not an important issue, although the draft concept began to be formulated	The development of elite sports occurs without a clear policy direction	Focus on sports coaching in the area of education
>19 years	The reverse – not considered an important issue, although character education is inflated	Policy direction and policy implementation strategy are far from the proper structure	The development of elite sports is far from what was expected, even though legal references are already clear	All three become the focus, although the direction of policy still out of the proper legal references

Dengan demikian, pada prinsipnya arah kebijakan olahraga mengikuti proses arah kekuasaan. Kepemimpinan nasional memiliki otoritas signifikan atas peluncuran kebijakan dan karenanya harus memutuskan kebijakan mana yang paling penting (Ma'mun, 2019). Pertimbangan prioritas kebijakan nasional memiliki harapan untuk mencapai dan diadopsi di tingkat masyarakat (Millar et al., 2020). Namun, banyak kekhawatiran tetap sehubungan dengan kebijakan yang mengatur olahraga (Nam et al., 2020).Pembuat keputusan cenderung membuat keputusan berdasarkan aliansi informal mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka (Nam et al., 2020).

Tabel 1.2 Indikator/Target Pembangunan Manusia (Bappenas, 2019, p. 100).

No	Indikator	Baseline	Target 2024
Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga			
23	a. Presentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	31,39% (2018)	40%
	b. Peringkat Asian Games	Peringkat ke-4 (2018)	Peringkat ke 6 sampai ke-8 (2022)
	c. Peringkat Asian Para Games	Peringkat ke-5 (2018)	Peringkat ke-4 sampai ke-6 (2022)
	d. Jumlah prolehan medali pada Olympic Games	1 Medali emas (2016)	3 medali emas
	e. Jumlah perolehan medali pada Paralympic Games	-	1 medali emas
Keterangan: * angka kumulatif			

Perspektif meninjau tingkat kesuksesan olahraga berdasarkan jumlah medali yang diperoleh merupakan perspektif yang tidak tepat dalam konteks pembangunan melalui olahraga. Dengan cara yang sama, karena masyarakat telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, olahraga telah berkembang untuk mendapatkan kepentingan yang luar biasa, baik secara sosial maupun ekonomi (Álvarez-García et al., 2019). Salah satu poin kunci yang muncul dari bukti yang tersedia adalah bahwa penyampaian dampak sosial tidak muncul secara spontan dalam banyak kasus, tetapi hal itu mencakup menempatkan mekanisme dan program tata kelola yang kompleks untuk mengarahkan tindakan kolektif (De Rycke & De Bosscher, 2019). Sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terhadap dokumen kebijakan pembangunan

Kebijakan publik seharusnya setiap keputusan yang dibuat oleh Negara/pemerintah yang merupakan strategi untuk merealisasikan tujuan Negara untuk mengantarkan kehidupan masyarakat awal, masyarakat transisi, dan untuk menuju pada masyarakat yang di dambakan (Ma'mun, 2016). Negara Indonesia harus menerapkan kebijakan olahraga dan strategi yang sebaiknya diambil untuk mewujudkan pembangunan olahraga (*development of sport*) dan pembangunan melalui olahraga (*Development through sport*) dengan tepat sehingga berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita nasional dan menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat. Hal ini yang perlu di pertimbangkan dalam isu global pembangunan olahraga yang telah menjadi perhatian PBB dengan gagasan sport development and peace yang telah banyak digunakan di Negara-Negara maju di berbagai dunia karena bersentuhan dengan

ukuran kemajuan pembangunan nasional SDGS dengan SDP nya sehingga kebijakan olahraga mampu menjawab tantangan di masa depan demi peroleh kemajuan Negara Indonesia yang diinginkan dan yang di harapkan.

Di Negara Indonesia, upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung berkesinambungan, dengan tujuan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya. Hal itu di lakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang datang untuk memenuhi kebutuhannya. Tahapan rencana jangka panjang dalam sistem pemerintahan Indonesia sudah di atur dan ditetapkan di dalam UU No.17 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN merupakan lanjutan dari pembangunan terdahulu untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Maka dalam kurun waktu 20 Tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan peneraan kembali langkah-langkah untuk melaksanakan pembangunan yang berhasil di semua bidang yang telah dirancang, antara lain; bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar daya saing yang kuat dalam pergaulan masyarakat Internasional. RPJPN sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJPN yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJPN hanya memuat arahan secara garis besar. Kurun waktu RPJPN adalah 20 (dua puluh) tahun.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk masa pemerintahan saat ini sudah berjalan RPJMN III Tahun 2015-2019 yang merupakan rencana pembangunan merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Wakil presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah ketiga dari RPJPN 2005-2025. Untuk menjamin pencapaian dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, RPJMN sekaligus digunakan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan Nasional Indonesia. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan

rencana pembangunan nasional, RPJMN merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Kementerian/Lembaga.

Hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan tentang “Bagaimana gagasan SDP terimplementasi dalam sistem perencanaan pembangunan olahraga nasional”, “bagaimana SDP membantu dalam pembangunan olahraga nasional”. Pertanyaan itulah yang menjadi latar belakang thesis yang diajukan oleh penulis, yakni Sport for development and peace dan implementasinya dalam sistem perencanaan pembangunan olahraga Nasional. Dalam thesis ini penulis membahas tentang terkait SDP dalam Rencana Strategis kementerian pemuda dan olahraga pada tahun 2015-2019 dalam bidang olahraga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana SDP diimplementasikan pada sistem perencanaan pembangunan olahraga nasional?
2. Bagaimana SDP membantu pembangunan olahraga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang akan diwujudkan atau diraih melalui penelitian ini. Berikut ini merupakan tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah sudah menerapkan SDP dalam sistem perencanaan pembangunan olahraga Nasional.
2. Untuk melihat bagaimana SDP membantu pembangunan olahraga

1.4 Batasan Penelitian

Batasan Penelitian ini adalah:

1. Batasan Konseptual

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Sport for Development and Peace dan Implementasi dalam sistem Perencanaan Pembangunan olahraga nasional yang di ambil dari Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2015-2019 edisi revisi.

2. Subjek penelitian

Dokumen kementerian pemuda dan olahraga pada Tahun 2015-2019 Edisi Revisi.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari segi manfaat, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat di antaranya:

1. Manfaat pemerintah.

Dari segi pemerintah di harapkan pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai kebijakan dapat lebih mengutamakan pembangunan olahraga dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan nilai sosial dari hasil olahraga, bukan sekedar medali sehingga olahraga menjadi aktifitas seluruh masyarakat.

2. Manfaat Teoritis.

Dari segi teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan management tentang menilai hasil pembangunan dan mengaplikasikan olahraga dalam perdamaian.

3. Manfaat Praktis.

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan sebagai sumber data untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang manajemen olahraga dalam pembangunan dan perdamaian. Bagi para mahasiswa dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi, sehingga diharapkan dapat bermanfaat tentang pentingnya berbagai pengembangan olahraga untuk menciptakan aktivitas yang positif dan perilaku hidup sehat melalui olahraga.

1.6 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam tesis, mulai dari bab I hingga bab V.

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari Tesis yang terdiri dari:

1. Latar Belakang Penelitian
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Struktur Organisasi Tesis

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka mempunyai peran yang sangat penting, kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teori dalam menyusun pertanyaan penelitian, tujuan, serta hipotesis, terdiri dari:

Pembahasan Teori – teori dan konsep dan turunannya dalam bidang yang dikaji

1. Penelitian yang relevan
2. Kerangka Pemikiran

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari:

1. Metode Penelitian
2. Lokasi, populasi, dan sampel penelitian
3. Desain penelitian
4. Definisi operasional
5. Analisis

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini mengemukakan mengenai:

1. Deskripsi dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian.
2. Pembahasan penemuan

Bab V berisi Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Bab ini berisi tentang:

1. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.
2. Implikasi dan rekomendasi yang berhubungan dengan penelitian.